

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
2013**

KATA PENGANTAR

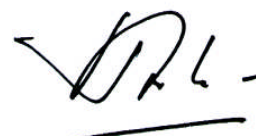
Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dimana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, disebutkan bahwa target Kementerian Pertanian difokuskan untuk mencapai Empat Target Sukses yaitu: (1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014, dimana RKT Kementerian Pertanian Tahun 2014 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun 2014.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2014 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian.

Jakarta, 5 Juli 2013
Menteri Pertanian,



Suswono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2014	5
2.1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian 2010-2014.....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2010-2014	6
2.3. Strategi Pembangunan Pertanian 2014	6
2.4. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2014	13
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014	17
3.1. Program dan Penjabaran Program Pembangunan Pertanian Tahun 2014	17
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan	24
3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
BAB IV PENUTUP	33
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produksinya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Pada tahun 2014 pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain: (1) dampak perubahan iklim pada sektor pertanian berupa: meningkatnya serangan OPT dan penyakit hewan, menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas hasil panen, (2) meningkatnya harga pangan yang berkorelasi pada tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan, (3) ketersediaan produksi kedelai, gula dan daging dalam negeri dan internasional terbatas, di sisi lain kebutuhan konsumsi domestik untuk ketiga komoditas tersebut meningkat, (4) kenaikan impor bahan pangan dan pakan akan mengurangi devisa negara, (5) terbatasnya pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani/peternak, (6) terbatasnya infrastruktur lahan dan air, (7) sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif, dan (8) belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Besarnya peran dalam perekonomian nasional tersebut ternyata belum dapat dinikmati secara proporsional oleh para pelaku usaha pertanian secara memadai.

Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan jaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi perubahan yang terjadi, mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana yang strategis.

Dalam rangka membangun ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis sektor pertanian tentunya harus dipahami bersama-sama sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang mampu memicu pembangunan pertanian secara optimal.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP, dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka perencanaan kinerja pembangunan pertanian pada TA. 2014, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2014.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Kementerian Pertanian Tahun 2014 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Kementerian Pertanian Tahun 2014;

- b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Kementerian Pertanian tahun 2014 adalah:

- a. Tersusunnya RKT Kementerian Pertanian Tahun 2014 secara baik dan terukur;
- b. Tersedianya arahan penyusunan PK Kementerian Pertanian Tahun 2014;
- c. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Pertanian Tahun 2014 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.

Di dalam PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 pada Lampiran II/1-3 memuat Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2014

2.1. VISI dan MISI Kementerian Pertanian 2010-2014

VISI Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”.

Sedangkan Misi Kementerian Pertanian yang diemban pada tahun 2010-2014 adalah:

- a. mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;
- b. menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;
- c. mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan;
- d. menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi;
- e. meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi;
- f. meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;
- g. mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan;
- h. mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional;
- i. mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan; dan
- j. meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

2.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2010-2014

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014:

- a. mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal;
- b. meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan;
- c. menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan;
- d. meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian; dan
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selama lima tahun ke depan, dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan EMPAT TARGET SUKSES, yaitu:

- a. pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
- b. peningkatan Diversifikasi Pangan;
- c. peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; dan
- d. peningkatan Kesejahteraan Petani.

2.3. Strategi Pembangunan Pertanian 2014

Guna mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan pertanian, strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 adalah melakukan revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan TUJUH GEMA REVITALISASI, yang terdiri dari: (1) lahan, (2) perbenihan dan perbibitan, (3) infrastruktur dan sarana, (4) sumber daya manusia, (5) pembiayaan petani, (6) kelembagaan petani, serta (7) teknologi dan industri hilir.

a. Revitalisasi Lahan

Revitalisasi lahan dilaksanakan melalui rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Audit lahan dengan membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui reinventarisasi dan reevaluasi potensi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan Sistem Informasi Geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik.
- 2) Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan pertanian.

- 3) Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian, dan perluasan areal lahan pertanian terutama di laur jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan dan kawasan hutan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan.
- 5) Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam penelolan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan untuk menekan laju alih fungsi lahan serta mendorong pengembangan usaha tani berskala ekonomi.
- 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marginal.
- 7) Optimalisasi sumber daya air eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik tanah maupun permukaan.

b. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan

Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah
- 2) Melindungi dan memelihara serta memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal
- 3) Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman
- 4) Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal
- 5) Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan
- 6) Membangun industri perbenihan dengan arah:
 - a) Kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas
 - b) Kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan
 - c) Industri benih berbasis komunitas
 - d) Riset berbasis perbenihan
- 7) Importir pedagang benih diharuskan mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi importir produsen benih dalam upaya untuk menahan laju benih impor

- 8) Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar) dan kelembagaan UPJA perkebunan.
- 9) Khusus untuk membangun perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras mulai dari keberadaan grand parent stock, parent stock sampai final stock. Sedangkan peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan bibit melalui penerapan sistem perbibitan, yaitu perbaikan mutu benih dan bibit ternak, optimalisasi kelembagaan perbibitan, sertifikasi, penjarangan, pemurnian, dan persilangan melalui penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

c. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

Dengan terbatasnya anggaran, revitalisasi infrastruktur dan sarana yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah diprioritaskan pada jalan usaha tani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tersier dan kuartier.

d. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pencapaian Empat Target Sukses Pembangunan Pertanian, pengembangan sumber daya manusia pertanian difokuskan pada:

- 1) Pengembangan penyuluh pertanian polivalen di tingkat lapangan dan penyuluh pertanian spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat untuk mendukung program utama pembangunan pertanian.
- 2) Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 3) Pelatihan bagi pengelola P4S dan pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT pelatihan, sedangkan pelatihan bagi petani pelaku utama agribisnis dilakukan oleh P4S
- 4) Pendidikan tinggi bidang Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional penyuluh pertanian, pengamat organisme pengganggu tanaman, paramedik veteriner, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan ternak, pengawas mutu hasil pertanian, dan karantina
- 5) Pendidikan menengah kejuruan di bidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknis menengah dan menyiapkan wirausahawan muda bidang pertanian.

Lima fokus tersebut diimplementasikan ke dalam empat rencana aksi, yaitu:

- 1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, melalui:
 - a) Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan
 - b) Pemantapan ketenagaan penyuluhan
 - c) Peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian
- 2) Pemantapan sistem pelatihan pertanian, melalui:
 - a) Pemantapan kelembagaan pelatihan
 - b) Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian
 - c) Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan
 - d) Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan pertanian
- 3) Revitalisasi sistem pendidikan pertanian, melalui:
 - a) Penataan kelembagaan pendidikan
 - b) Peningkatan kualitas ketenagaan pendidikan pertanian
 - c) Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
 - d) Pengembangan kerjasama teknis pendidikan pertanian
- 4) Pemantapan sistem administrasi dan manajemen pengembangan SDM Pertanian, melalui:
 - a) Penerapan sistem dan prosedur perencanaan
 - b) Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan perlengkapan
 - c) Pengembangan peraturan perundangan, sistem dan prosedur organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian
 - d) Pengembangan sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

e. Revitalisasi Pembiayaan Petani

Persoalan mendasar yang dihadapi petani dan peternak adalah akses permodalan kepada lembaga keuangan formal dan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk memperbaiki dan mengatasi kondisi tersebut diperlukan upaya-upaya:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada melalui sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi di tingkat lapangan yang lebih intensif.

- 2) Pengembangan skim kredit program yang semula hanya untuk usaha budidaya, diperluas mencakup usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil
- 3) Memperluas lembaga penjamin dan komoditas yang difasilitasi oleh skim risk-sharing dalam skim KKP-E
- 4) Mengintegrasikan skim kredit bersubsidi (KKP-E) dengan skim kredit penjaminan (KUR) sehingga pangsa kredit pertanian menjadi lebih besar
- 5) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani sebagai channeling agent lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun non perbankan untuk membiayai permodalan petani
- 6) Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani
- 7) Mengembangkan pola kerjasama kemitraan tertutup antara perbankan, pemerintah daerah, penjamin pasar dan penjamin kredit (avalis) dalam rangka mengatasi keterbatasan agunan yang dimiliki oleh petani
- 8) Menumbuhkembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis di perdesaan sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal
- 9) Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai potensi wilayah
- 10) Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.

f. Revitalisasi Kelembagaan Petani

Upaya-upaya yang dapat dilakukan terkait dengan adanya kelembagaan petani adalah:

- 1) Terus memperbanyak kelompok dan gabungan kelompok tani
- 2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan, baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran
- 3) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha
- 4) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan
- 5) Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

g. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

1) Revitalisasi teknologi

- a) Perakitan varietas tanaman pangan umur ultra genjah toleran terhadap cekaman biotik/abiotik dan adaptif untuk daerah tropis
- b) Pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik hortikultura sebagai bahan perakitan varietas unggul baru adaptif daerah tropis serta inovasi teknologi modern yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal yang dapat mengantisipasi perubahan iklim dan menanggulangi permasalahan OPT
- c) Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dalam konteks kebijakan prioritas komoditas melalui kegiatan pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik, inovasi teknologi budidaya dan pengolahan hasil
- d) Penelitian peternakan dan veteriner dilaksanakan melalui eksplorasi sumber daya genetik, pengembangan sistem perbibitan ternak ruminansia besar melalui twinning serta perakitan grand parent stock ayam lokal perakitan bangsa ternak dan tanaman pakan dengan konsep low external input.
- e) Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya lahan pertanian meliputi pemetaan tanah sistematis dan pemetaan tematik di lokasi terpilih dengan memanfaatkan citra satelit, digital elevation model (DEM) berbasis GIS
- f) Pengkayaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik pertanian, perbaikan sifat unggul ternak, tanaman dan mikroba pertanian melalui teknik kultur in vitro, rekayasa genetik, dan marka molekuler serta pemanfaatan bioteknologi untuk pembentukan varietas, perbanyak bibit, pengolahan produk dan limbah pertanian
- g) Menghasilkan pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan hasil pengkajian kebijakan penguatan dan perlindungan usaha pertanian, SDA, infrastruktur dan investasi pertanian, kelembagaan dan regulasi pertanian, ekonomi makro, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan perdesaan, penelitian dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan, pelaksanaan evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual
- h) Perekayasaan/penelitian dan pengembangan mekanisasi meliputi lima kegiatan utama, yaitu perekayasaan/penelitian teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas dan

efisiensi pemanfaatan sumber daya pertanian, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, pemanfaatan limbah dan sumber daya energi terbarukan di bidang pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi mekanisasi pertanian berbasis kemitraan dan analisis serta sintesis kebijakan untuk percepatan pengembangan mekanisasi pertanian

- i) Kegiatan penelitian dan pengembangan pasca panen difokuskan untuk menghasilkan inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung pencapaian target diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
 - j) Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian diharapkan dapat menjembatani apa yang dilaksanakan pusat penelitian dengan apa yang dibutuhkan pengguna di berbagai tingkatan di daerah
 - k) Pengembangan kelembagaan mencakup pengembangan budaya kerja inovatif berorientasi bisnis, pengembangan sumberdaya penelitian dan pengembangan diikuti pengembangan standardisasi dan akreditasi lembaga dan pranata penelitian dan pengembangan.
 - l) Pengembangan perpustakaan digital lingkup Kementerian Pertanian dilakukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi.
- 2) Revitalisasi industri hilir
- a) Penumbuhkembangan industri pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
 - b) Prioritas komoditas yang akan dikembangkan selama 2010-2014 adalah beras, tepung lokal (mocaf/modified cassava flour, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan, tanaman obat, kelapa sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, jambu mete, pakan ternak skala kecil, pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi serta derivasi produk
 - c) Peningkatan daya saing produk pertanian melalui penguatan posisi tawar petani
 - d) Peningkatan kapasitas poktan/gapoktan untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan produk pertanian
 - e) Peningkatan kualitas SDM penyuluh, petani, dan pelaku industri pedesaan untuk peningkatan efisiensi biaya produksi dan peningkatan mutu

- f) Pemberian insentif untuk menunjang berkembangnya industri hilir
- g) Peningkatan dan pengamanan mutu produk pertanian dengan menerapkan standardisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk di tangan konsumen.

2.4. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2014 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan dan tahu terakhir dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari RKP 2014, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor lima berupa Peningkatan Ketahanan Pangan. Kebijakan tahun 2014 mempertimbangkan kinerja capaian 2010-12, kondisi yang berkembang 2013, dan antisipasi tantangan serta kebutuhan tahun 2014 dalam kerangka pembangunan jangka menengah.

Kementerian Pertanian dalam waktu 2010-2014, telah menetapkan 23 arah kebijakan pembangunan pertanian, meliputi:

- a. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya;
- b. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), pengembangan desa mandiri pangan, penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat, dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;
- c. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
- d. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
- e. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;
- g. Jaminan penguasaan lahan produktif;
- h. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;

- i. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;
- j. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
- k. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
- l. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
- m. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
- n. Pengembangan *bio-energi* berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
- o. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
- p. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
- q. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
- r. Penguatan sistem perkarantina pertanian;
- s. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;
- t. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
- u. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
- v. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;
- w. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*.

Sejak tahun 2013 Kementerian Pertanian telah mengambil kebijakan pembangunan pertanian dengan fokus komoditas dan lokasi dengan pendekatan kawasan pertanian. Pendekatan kawasan ini disebut dengan *cluster*. Pendekatan *cluster* dibangun dengan mengembangkan kawasan yang sudah ada (*existing*) maupun dapat pula mengembangkan kawasan baru.

a. Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada (*existing*)

Pola ini ditujukan bagi kawasan pertanian yang sudah ada dan berkembang, untuk memperluas skala produksi, serta melengkapi/memperkuat simpul-simpul agribisnis yang belum berfungsi optimal. Luasan kawasan dapat bertambah sesuai dengan daya dukung. Kawasan yang telah mandiri diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya (*trickle-down effect*).

b. Pola Pengembangan Kawasan Baru

Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas unggulan pada wilayah baru/potensial yang belum dikembangkan. Ada dua pendekatan pengembangan kawasan, yaitu (1) memperluas skala dan mengadakan kegiatan yang belum terlaksana, (2) membangun kawasan baru di kawasan potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum kawasan.

Pengembangan *cluster* ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dengan mengembangkan 40 komoditas strategis dan unggulan nasional, meliputi 30 komoditas pangan dan sepuluh komoditas non pangan secara terpadu dan *multi-years*. Jenis komoditas yang akan dikembangkan antara lain:

- a. Tanaman pangan tujuh komoditas, yaitu: padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
- b. Hortikultura 11 komoditas, yaitu: cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis, salak, rimpang, dan tanaman hias (krisan dan anggrek).
- c. Perkebunan 15 komoditas, yaitu: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu, karet, kapas tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dan kemiri sunan.
- d. Peternakan tujuh komoditas, yaitu: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, dan itik.

Dari 40 jenis komoditas tersebut, terdapat lima jenis komoditas strategis nasional yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi yang diharapkan dapat mencapai swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, serta mencapai swasembada pada 2014 untuk kedelai, tebu, dan daging sapi. Komoditas cabai dan bawang merah juga mendapat perhatian guna menjamin kontinuitas pasokan bagi konsumen.

Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan lainnya. Kegiatan di dalam lokasi *cluster* bersifat pengutuhan kegiatan pada kondisi yang sudah ada (*existing*) dengan rancangan program/kegiatan disusun secara terpadu dan *multi-years*. Dalam hal ini, perlu dilakukan identifikasi potensi dan kebutuhan kegiatan, serta peluang bagi investor untuk berpartisipasi. Kegiatan swasta yang dapat dibangun antara lain mencakup usaha di bidang perbenihan yang teknologinya belum dikuasai petani, industri alat-mesin, industri pasca panen dan pengolahan, pemasaran, maupun usaha kemitraan dengan petani. Pengembangan *cluster* tersebut diantaranya guna mendukung Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI).

Sentra pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu, sentra merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra terdapat suatu kesatuan fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta SDM, yang berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan. Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan lima komoditas strategis nasional di kabupaten/kota di lokasi *cluster* melalui penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran dan lainnya. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mensinergikan kegiatannya untuk mendukung pengembangan "*cluster*" tersebut melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.

Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu : (1) tahap inisiasi pada kawasan yang belum berkembang; (2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; (3) tahap pengembangan kawasan; (4) tahap pematapan kawasan; (5) tahap integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat keterkaitan antar pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014

3.1. Program dan Penjabaran Program Pembangunan Pertanian Tahun 2014

Program utama pembangunan pertanian merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan pada jangka menengah.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

Kementerian Pertanian pada tahun 2014 melaksanakan 12 Program Pembangunan Pertanian. Masing-masing program pembangunan pertanian tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 12 unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian. Ukuran keberhasilan Eselon-I dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II). Adapun 12 Program Pembangunan Pertanian Tahun 2014 disajikan pada Tabel 3-1.

Tabel 3-1. Program Pembangunan Kementerian Pertanian Tahun 2014

No.	Nama Program
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
4	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
5	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
6	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal
7	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian
8	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
9	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
10	Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
11	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
12	Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Program pembangunan pertanian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Pada masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Eselon-II sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon-II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk *output*. Penjabaran 12 program ke dalam 78 kegiatan secara rinci disajikan pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2. Rancangan Program dan Kegiatan Pertanian Tahun 2014

No.	Program/Kegiatan
1.	<p data-bbox="284 342 1326 416">Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 454 1150 490">1.1 Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik</p> <p data-bbox="284 533 1342 607">1.2 Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral</p> <p data-bbox="284 649 1358 723">1.3 Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 766 1430 801">1.4 Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian</p> <p data-bbox="284 844 1310 880">1.5 Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 922 1273 958">1.6 Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian</p> <p data-bbox="284 1001 1394 1113">1.7 Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan, dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian</p> <p data-bbox="284 1155 1198 1191">1.8 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian</p>
2.	<p data-bbox="284 1234 1369 1308">Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 1350 1374 1462">2.1 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</p> <p data-bbox="284 1505 1414 1617">2.2 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Badan Ketahanan Pangan</p> <p data-bbox="284 1659 1350 1733">2.3 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian</p> <p data-bbox="284 1776 1430 1888">2.4 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian</p> <p data-bbox="284 1930 1374 2004">2.5 Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian</p>

No.	Program/Kegiatan	
	2.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	
	3.1	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
	3.2	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
	3.3	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
	3.4	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
	3.5	Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
	3.6.1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
	3.6.2	Penyaluran Subsidi Benih Tanaman Pangan
	3.7	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
	3.8	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
4.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	
	4.1	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
	4.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
	4.3	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
	4.4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
	4.5	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
	4.6	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

No.	Program/Kegiatan
5.	<p>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</p> <p>5.1 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar</p> <p>5.2 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim</p> <p>5.3 Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Tahunan</p> <p>5.4 Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan</p> <p>5.5 Dukungan Perlindungan Perkebunan</p> <p>5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan</p> <p>5.7 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan</p>
6.	<p>Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal</p> <p>6.1 Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal</p> <p>6.2 Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal</p> <p>6.3 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis</p> <p>6.4 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal</p> <p>6.5 Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan</p> <p>6.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan</p>
7.	<p>Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian</p> <p>7.1 Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian</p> <p>7.2 Pengembangan Pemasaran Domestik</p>

No.	Program/Kegiatan	
	7.3	Pengembangan Pemasaran Internasional
	7.4	Pengembangan Usaha dan Investasi
	7.5	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
	7.6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	
	8.1	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
	8.2	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
	8.3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
	8.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	8.5	Fasilitas Pupuk dan Pesticida
	8.6	Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
9.	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	
	9.1	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
	9.2	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian
	9.3	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
	9.4	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
	9.5	Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian
	9.6	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	9.7	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura
	9.8	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
	9.9	Penelitian dan Pengembangan Peternakan

No.	Program/Kegiatan	
	9.10	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
	9.11	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
	9.12	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian
10.	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	
	10.1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
	10.2	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian
	10.3	Pendidikan Menengah Pertanian
	10.4	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
	10.5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	11.1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
	11.2	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
	11.3	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
	11.4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
12.	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	
	12.1	Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama, dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan
	12.2	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
	12.3	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
	12.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

No.	Program/Kegiatan	
12.5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian	
12.6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan pembangunan pertanian 2014 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian sesuai yang tertuang dalam RKP 2014. Prioritas Kementerian sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Hasil evaluasi paruh waktu Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 terhadap pencapaian empat sasaran strategis pembangunan pertanian menunjukkan bahwa:

a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan

1) Swasembada padi

Produksi padi nasional tahun 2010-2012 menunjukkan tingkat produksi yang fluktuatif. Produksi padi pada tahun 2010 sebesar 66,47 juta ton, mengalami penurunan produksi pada tahun 2011 menjadi 65,76 juta ton, pada tahun 2012 mencapai 69,06 juta ton dan ARAM-II tahun 2013 sebesar 70,87 juta ton. Pada tahun 2014 ditargetkan mencapai 76,57 juta ton.

2) Swasembada jagung

Dengan menggunakan sasaran produksi jagung pada Renstra 2010-2014, realisasi pencapaian produksi jagung tahun 2010-2012 cenderung mengalami penurunan. Target produksi tahun 2011-2012 sebesar 22 juta ton dan 24 juta ton hanya tercapai 17,64 juta ton dan 19,39 juta ton. Dengan realisasi seperti itu, maka dilakukan revisi terhadap sasaran produksi jagung pada Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 melalui Road Map Pencapaian Sasaran Produksi Jagung 2012-2014, sehingga diharapkan neraca produksi pada tahun 2014 menjadi surplus. Berdasarkan data ARAM-II tahun 2013 produksi jagung mencapai 18,51 juta ton atau 93,34% dari target 19,83 juta ton. Pada tahun 2014 ditargetkan mencapai 20,82 juta ton.

3) Swasembada kedelai

Pencapaian produksi kedelai 2010-2012 jauh di bawah target yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014. Rendahnya capaian produksi kedelai terutama disebabkan karena tidak tercapainya luas panen dan rendahnya produktivitas riil yang dicapai petani. Berdasarkan data ARAM-II tahun 2013 produksi kedelai mencapai 0,81 juta ton (54% dari target 1,5 juta ton). Pada tahun 2014 produksi kedelai ditargetkan 1,5 juta ton.

4) Swasembada gula

Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, swasembada gula nasional tercapai dengan asumsi lahan untuk perluasan tebu sudah tersedia pada tahun 2010 dan revitalisasi pabrik gula milik BUMN sudah berjalan mulai tahun 2010. Akan tetapi, asumsi tersebut tidak dapat terpenuhi. Dengan memperhitungkan kebutuhan gula total, sampai dengan Juni 2012 target swasembada gula nasional baru tercapai sekitar 50% dan pada tahun 2014 diperkirakan terjadi defisit gula nasional sebesar 2,25 juta ton.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dikarenakan industri pergulaan di Indonesia melibatkan banyak instansi, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan membuat proyeksi produksi gula kristal putih yang bisa dikendalikan langsung oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2010 produksi gula sebesar 2,21 juta ton, tahun 2011 sebesar 2,23 juta ton, tahun 2012 sebesar 2,59 juta ton dan perkiraan sementara produksi tahun 2013 sebesar 2,55 juta ton. Pada tahun 2014 diproyeksikan produksi gula kristal putih sebesar 3,10 juta ton.

5) Swasembada daging

Data target produksi berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 menunjukkan bahwa total produksi daging sapi pada tahun 2010 mencapai 436,47 ribu ton, masih di bawah target produksi (93,20%). Hasil sensus ternak yang dilakukan Kementerian Pertanian dan BPS pada tahun 2011 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dimana secara agregat melebihi perkiraan target yang ada.

Selama tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2012 perkembangan realisasi produksi cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,57% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target pertumbuhan produksi 2010-2014 sebesar 7,49% per

tahun. Produksi daging sapi pada tahun 2010 sebesar 0,44 juta ton, tahun 2011 sebesar 0,48 juta ton, tahun 2012 sebesar 0,51 juta ton, dan produksi sementara tahun 2013 sebesar 0,54 juta ton. Pada tahun 2014 produksi daging sapi ditargetkan sebesar 0,53 juta ton.

b. Peningkatan diversifikasi pangan

Indeks Pola Pangan Harapan tahun 2010 dan 2011 masih dibawah target yang telah ditentukan. Pencapaian skor PPH yang masih di bawah target disebabkan oleh masih tingginya tingkat konsumsi beras dan masih rendahnya kontribusi energy yang berasal dari sumber karbohidrat umbi-umbian serta penurunan tingkat konsumsi yang berasal dari kelompok sayur dan buah serta kacang-kacangan (kecuali kedele). Target skor PPH pada tahun 2014 sebesar 93,3.

c. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor

Neraca perdagangan pertanian meningkat, pada tahun 2010 sebesar US\$ 10,33 milyar menjadi US\$ 13,52 milyar pada triwulan III tahun 2012. Surplus perdagangan tersebut hanya terjadi pada komoditi perkebunan, sementara komoditi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus mengalami defisit. Selain itu, target lainnya dari sasaran peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor adalah 100% tersertifikasinya produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada tahun 2014. Akan tetapi, hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan realisasi kegiatan sertifikasi pada tahun 2010 dan 2011 sangat kecil, yaitu hanya 26 kelompok (sangat kecil dibandingkan dengan potensi nasional). Tidak adanya data/informasi dasar tentang berapa kelompok target sertifikasi yang diperlukan agar kegiatan sertifikasi bisa dilaksanakan menyulitkan kegiatan evaluasi.

Masalah juga ditemukan dalam kegiatan sertifikasi kakao fermentasi, mulai dari pelaksanaan kegiatan hinggabelum jelasnya panduan sertifikasi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan fermentasi kakao di lapangan sangat sedikit dibandingkan dengan potensinya yang disebabkan oleh: (a) keterbatasan modal untuk pengadaan bahan baku; (b) bantuan alat tidak tepat guna; (c) keterbatasan pasar (penampung) produk kakao fermentasi; dan (d) perbedaan harga kakao fermentasi dan non fermentasi.

Terkait dengan kebijakan produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor, pemerintah mengharapkan selama lima tahun kemandirian tepung nasional dapat dicapai sehingga pada akhir tahun 2014 dapat mensubstitusi 20% tepung impor. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan mocaf. Pelaksanaan program ini di lapangan menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah masalah pasar, dimana

produk olahan mocaf masih dianggap belum menguntungkan dan belum memenuhi persyaratan mutu pasar (kasar).

d. Peningkatan kesejahteraan petani

Saat ini, rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp 4,69 juta per tahun. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian menargetkan pendapatan per kapita petani dapat meningkat menjadi Rp 7,93 juta per tahun atau adanya kenaikan pendapatan petani per kapita 11,1% setiap tahunnya. Dalam peningkatan pendapatan petani, subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan telah memberikan kontribusi yang optimal, bahkan pada tahun 2010 mencapai 105% dari target yang direncanakan.

Dari sekian rencana aksi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, yang dikelompokkan terkait langsung dengan peningkatan pendapatan petani per kapita adalah kegiatan PUAP dan LM3. Kontribusi PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani berangsur meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2011 meskipun capaiannya masih dibawah target. Hal ini menunjukkan ada sharing nyata yang diindikasikan dengan pertumbuhan jumlah gapoktan yang meningkat dan dampaknya secara nasional berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 13,33% pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 angka kemiskinan menurun kembali menjadi 12,46%, mengindikasikan peningkatan pendapatan petani atas kinerja PUAP yang cukup baik.

Dalam kegiatan LM3, efektifitas kinerja selama dua tahun ditinjau dari sisi capaian target adalah cukup baik yang ditandai dengan tingginya realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Sesuai Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, sasaran pembangunan pertanian tahun 2014, meliputi: pertumbuhan pendapatan per kapita petani sebesar 11,10 persen, penurunan konsumsi beras per kapita sebesar 1,50 persen, skor Pola Pangan Harapan sebesar 93,3, dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani pada tahun 2014 ditargetkan berkisar antara 105-110 (tahun dasar 2007=100).

Sasaran kuantitatif produksi beberapa komoditas utama pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran produksi komoditas tanaman pangan tahun 2014 meliputi: padi sebesar 76,57 juta ton, jagung 20,82 juta ton, kedelai 1,50 juta ton, kacang tanah 1,3 juta ton, kacang hijau 0,43 juta ton, ubi kayu 27,6 juta ton, dan ubi jalar 2,60 juta ton;
- b. Sasaran produksi hortikultura tahun 2014, mencakup: cabe 1,52 juta ton, bawang merah 1,20 juta ton, kentang 1,21 juta ton, mangga 2,59 juta ton,

pisang 7,07 juta ton, jeruk 2,36 juta ton, durian 0,85 juta ton, manggis 0,11 juta ton, temu lawak 0,03 juta ton, anggrek 15,91 juta tangkai, dan krisan 218,91 juta tangkai;

- c. Sasaran produksi komoditas perkebunan tahun 2014 meliputi: gula 3,10 juta ton, kelapa sawit/CPO 28,44 juta ton, karet 2,80 juta ton, kelapa 3,38 juta ton, kopi 0,77 juta ton, kakao 1,05 juta ton, lada 0,09 juta ton, cengkeh 0,08 juta ton, jambu mete 0,16 juta ton, tembakau 0,18 juta juta ton, kapas 0,06 juta ton, teh 0,16 juta ton, jarak pagar 0,03 juta ton, dan nilam 0,12 juta ton;
- d. Sasaran produksi komoditas peternakan tahun 2014 meliputi: daging sapi 534,76 ribu ton karkas, kerbau 39,66 ribu ton, kambing/domba 160,69 ribu ton, babi 247,42 ribu ton, ayam buras 400,81 ribu ton, itik 33,03 ribu ton, dan susu segar 1,47 juta ton.

Untuk mencapai empat sasaran strategis pembangunan pertanian pada tahun 2014, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
 - 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai
 - a) Cetak sawah seluas 40.000 ha, peningkatan Indeks Pertanaman melalui optimasi lahan seluas 200.000 ha dan System of Rice Intensification (SRI) seluas 180.000 ha.
 - b) Percepatan penetapan Peraturan Daerah mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (saat ini baru ditetapkan 107 kabupaten/kota).
 - c) Perluasan areal tanam jagung seluas 450.000 ha di tujuh provinsi (Aceh 50.000 ha, Jawa Timur 90.000 ha, Sulawesi Utara 60.000 ha, Sulawesi Tengah 60.000 ha, Sulawesi Tenggara 50.000 ha, Nusa Tenggara Timur 20.000 ha, dan Nusa Tenggara Barat 120.000 ha).
 - d) Optimalisasi pemanfaatan areal lahan transmigrasi untuk kedelai seluas 155.000 ha dan di lahan terlantar (bera) 340.000 ha di 15 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah).
 - e) Perluasan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Koorporasi (GP3K) seluas 1.100.000 Ha.
 - f) Perbaiki jaringan irigasi primer dan sekunder (rehabilitasi 283.000 ha, pembangunan baru 56.000 ha) serta tersier 500.000 ha di kawasan sentra pangan utama.

- g) Penyebaran dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 14.577 unit.
 - h) Peningkatan gerakan percepatan tanam serempak dengan melibatkan instansi terkait seluas 275.000 ha.
 - i) Akselerasi pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar Rp 6,2 Triliun.
 - j) Sistem pengadaan benih/bibit yang sesuai musim tanam dan karakteristik benih/bibit.
- 2) Swasembada gula
- a) Intensifikasi/rawat ratoon tebu seluas 61.000 ha.
 - b) Bongkar ratoon tebu seluas 8.000 ha.
 - c) Perluasan areal (ekstensifikasi) seluas 10.000 ha.
 - d) Penyediaan benih varietas unggul (kultur jaringan) sebanyak 2.250 ha.
- 3) Swasembada daging
- a) Produksi semen beku sebanyak 5.600.000 dosis dan embrio beku sebanyak 800 embrio.
 - b) Peningkatan tingkat kelahiran melalui pelaksanaan inseminasi Buatan (IB) sebanyak 1.100.000 ekor dan kawin alam sebanyak 2.100.000 ekor.
 - c) Pengembangan integrasi sapi-sawit kerjasama PTPN dan swasta dengan plasma sebanyak 40.000 ekor melalui pemanfaatan kredit program.
 - d) Fasilitasi teknis akses asuransi ternak: sapi potong 30.000 ekor dan sapi perah 10.000 ekor.

b. Peningkatan diversifikasi pangan

Komponen kegiatan pengembangan pangan lokal umbi-umbian dan buah-buahan harus lebih didorong dalam pelaksanaan P2KP agar dapat lebih berkontribusi dalam penurunan konsumsi beras. Komponen kegiatan pengembangan pengolahan tepung-tepungan dari bahan pangan lokal harus didukung dengan pelatihan kewirausahaan kepada kelompok dan usaha individual secara lebih yang intensif serta didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan usaha dan atau pendampingan aksesibilitas ke sumber pembiayaan skala kecil dan mikro. Komponen kegiatan sosialisasi P2KP

kepada siswa usia dini perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi lanjutan kepada orang tua dan keluarga.

c. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor adalah melalui kegiatan kakao fermentasi. Terkait kegiatan kakao fermentasi, upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: (1) pengembangan sistem fermentasi ditingkat rumahtangga melalui pengembangan alat fermentasi tepat guna skala rumahtangga, (2) bantuan modal dan pendampingan untuk pengembangan alat fermentasi tepat guna skala rumahtangga, dan (2) pengembangan kemitraan kelompok fermentasi kakao dengan perusahaan penampung

Selain itu, dalam Rentra Kementerian Pertanian menargetkan terjadi peningkatan produk olahan yang diperdagangkan meningkat dari 20 persen dalam tahun 2010 menjadi 50 persen pada tahun 2014. Untuk itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain pengembangan agroindustri pedesaan untuk semua subsektor, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani serta peningkatan upaya pengelolaan lingkungan.

Terkait dengan pengembangan industri mocaf untuk dapat mensubstitusi tepung impor, dari hasil *focus group discussion* yang dilakukan di Lampung Selatan dan Jawa timur dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut: (1) Perlu adanya pelatihan untuk merubah tepung mocaf menjadi bahan tiwul dengan tambahan alat pengayak; dan (2) Diperlukan tenaga pendamping dalam hal pengolahan ubikayu menjadi mocaf sesuai standart dan permintaan pasar.

d. Peningkatan kesejahteraan petani

Dari sekian rencana aksi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, yang dikelompokkan terkait langsung dengan peningkatan pendapatan petani per kapita adalah kegiatan PUAP dan LM3. Permasalahan yang menghambat capaian target PUAP tidak terlepas dari kualitas pengelolaan yang belum memadai baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan. Untuk itu masalah-masalah seperti organisasi tani yang masih lemah, akses permodalan, pasar dan teknologi yang belum mencukupi, serta profesionalisme pengurus yang belum memadai perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya optimalisasi .

Masalah yang menghambat tujuan pelaksanaan PUAP di tingkat gapoktan dan pengurus antara lain adalah: Aliran modal lebih banyak keluar sector pertanian (non farm) sehingga terkesan Kementerian Pertanian cukup banyak menyumbang untuk prestasi sektor non pertanian. Perlu dipertimbangkan kedepannya agar aliran dana PUAP lebih fokus dimanfaatkan untuk pengembangan di dalam sektor pertanian.

Sedangkan perbaikan dalam kegiatan LM3 dapat dilakukan melalui: (1) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kelompok LM3 maka frekuensi pendampingan oleh penyuluh pendamping, perlu diintensifkan dengan terlebih dahulu melakukan pembekalan IPTEK dan manajemen yang memadai pada ketiga pendamping tersebut; (2) peningkatan kesejahteraan Penyuluh, POPT untuk bisa melaksanakan tugas berat membina kelompok yang banyak dengan wilayah binaan yang sangat luas. fasilitas kerja yang dimaksud adalah honor yang memadai, sepeda motor dan akses jenjang kepangkatan.

3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka IKU Kementerian Pertanian antara lain:

- a. Swasembada:
 - 1) Jumlah produksi kedelai.
 - 2) Jumlah produksi gula.
 - 3) Jumlah produksi daging sapi.
- b. Swasembada berkelanjutan:
 - 1) Jumlah produksi padi.
 - 2) Jumlah produksi jagung.
- c. Persentase penurunan konsumsi beras per tahun.
- d. Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran.
- e. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- f. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib).
- g. Persentase peningkatan produk olahan yang diekspor.
- h. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu.
- i. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan.
- j. Pendapatan per kapita petani.

- k. Nilai Tukar Petani (NTP).
- l. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.
- m. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.
- n. Investasi sektor pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2014 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian melaksanakan 12 program pembangunan pertanian dan 80 kegiatan guna mencapai empat target sukses yang telah ditetapkan.

Disamping itu, kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

-o0o-

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian

Tahun : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Swasembada Berkelanjutan 1. Produksi Padi 2. Produksi Jagung Swasembada Berkelanjutan 1. Produksi Kedelai 2. Produksi Gula 3. Produksi Daging Sapi	76,57 Jt Ton GKG 20,82 Juta Ton 1,50 Juta Ton 3,10 Juta Ton 0,53 Juta Ton
2.	Meningkatnya Diversifikasi Pangan	1. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1,50% 93,3
3.	Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor	1. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet 2. Meningkatnya produk olahan yang diekspor 3. Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor 4. Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri 5. Meningkatnya surplus neraca perdagangan	90% 63% 11% 60% 23%
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1. Pertumbuhan pendapatan per kapita petani 2. Nilai Tukar Petani (NTP)	11,10% 105 - 110